

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Australia bisa dikatakan sangat unik. Hubungan ini dapat dilihat dengan adanya kerja sama dari kedua negara tersebut yang sangat kuat. Namun, di sisi lain adanya perbedaan aspek sosial budaya, ras, ideologi politik, ekonomi, dan teknologi yang berkembang saat ini dapat menjadi ancaman bagi kedua negara tersebut.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dilihat dari berbagai masalah yang terjadi di Papua. Pada tanggal 19 November 1969 Papua resmi masuk NKRI dan menjadi daerah otonom melalui UU No. 12 tahun 1969. Sejak resmi menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak masyarakat Papua yang masih merasa tidak puas. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat kemiskinan di Papua yang masih sangat tinggi. Papua yang terletak di bagian timur Indonesia dengan luas 785,753 km<sup>2</sup> dan didukung dengan sumber daya alam yang ada, seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

---

<sup>1</sup> Fatmawati dan Tarunasena, “Dinamika Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Pada Masa Perdana Menteri John Howard Tahun 1996-2007”, *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol.7 No.2 (Oktober, 2018), 145.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Papua saat ini baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan transportasi membuat penduduk Papua ingin memerdekakan diri.<sup>2</sup> Untuk mengatasi masalah separatisme, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengadakan operasi militer di Papua, namun berdasarkan fakta di lapangan justru menimbulkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pemerintah dinilai gagal dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua. Separatisme di Papua selain dipicu dari aspek ekonomis, juga dipicu oleh kekecewaan historis, nasionalisme, diskriminasi politik dan hukum, dan peminggiran sosial budaya. Organisasi Papua Merdeka merupakan penggerak separatisme di Papua dan diikuti dengan pembentukan Presidium Dewan Papua. Perlawanan yang dipimpin oleh OPM dapat dilihat dengan adanya demonstrasi, aksi kejahatan, aksi pengrusakan, dan pelanggaran lintas batas negara. Isu separatisme di Papua menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia saat ini.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi di era digital saat ini begitu cepat, salah satunya ditandai dengan banyaknya media berita digital berbasis internet baik dari dalam maupun luar negeri. Media digital berbasis internet saat ini seakan menggantikan peran suatu negara, kegiatan berdiplomasi yang merupakan elemen penting suatu negara dalam membangun kerja sama dengan negara lain dapat dilakukan secara online.

---

<sup>2</sup>Papuanews.id, “1 Mei 1963: Mengenang Masuknya Papua ke Wilayah NKRI”, <https://papuanews.id/2020/05/01/1-mei-1963-mengenang-masuknya-papua-ke-wilayah-nkri/> (Kamis, 03 September 2020, 19.30)

<sup>3</sup>Yuliana Sugandi, “Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua”, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/06393.pdf> (Kamis, 10 September 2020, 21.15)

Permasalahan yang ada di setiap negara pun akan tersebar sangat cepat dan semua orang dapat mengakses berita tersebut seperti permasalahan yang ada di Papua. Terkait masalah Papua, Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas tanah Papua Barat. Namun, Australia tetap menyisakan kelompok suara tak senada dalam menyoroiti pelanggaran HAM serta tertutupnya jurnalis asing dan pengamat meliput keadaan di Papua Barat. Pemberitaan masalah Papua di media daring ini dapat berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Pada 19 Agustus 2019 terjadi unjuk rasa Manokwari Papua. Dalam unjuk rasa tersebut, massa membakar gedung DPR setempat. Selain fasilitas umum, pengunjuk rasa juga membakar beberapa properti pribadi. Massa meneriakkan slogan-slogan pro kemerdekaan sambil mengibarkan bendera bintang kejora, dan bendera lama nugini Belanda. Tidak hanya itu, massa juga menurunkan bendera merah putih yang berada di depan kantor gubernur Jayapura. Beberapa Massa menggunakan pakaian monyet memblokir jalan ke bandar udara sentani. Massa mendatangi bandar udara domine eduard osok dan merusak terminal bandara. Kerusakan ini terjadi menanggapi cercaan “monyet” di Surabaya. Akibat kerusakan tersebut, operasi bandara mengalami gangguan untuk sementara waktu. Tidak hanya di bandara, massa juga membakar penjara kota, yang mengakibatkan banyak tahanan dan narapidana melarikan diri. Pada 21 Agustus 2019, massa menggelar unjuk rasa kembali di kota Fakfak. Massa membakar gedung pekantoran, pasar, dan memblokir jalan ke Bandar Udara Torea

Fakfak. Beberapa orang terluka dalam protes dan bentrokan tersebut. Tidak sampai di situ, massa juga menggelar unjuk rasa di Merauke, Nabire, Yahukimo and Biak.<sup>4</sup>

Tanggal 22 Agustus 2019, Mahasiswa Papua juga mengadakan unjuk rasa di depan gedung kementerian dalam negeri republik Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, massa juga menggelar unjuk rasa di Bandung, Yogyakarta dan Denpasar untuk memprotes rasisme yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua. Tidak sampai di situ, pada 26 Agustus 2019, pengunjuk rasa secara serentak mengibarkan bendera Papua Barat di kabupaten deiyai dan di kota-kota Papua lainnya. Menurut beberapa aktivis, demonstrasi ini merupakan yang terbesar dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah.<sup>5</sup>

Awalnya rusuh biasa dan adanya ujaran yang berbau rasisme, namun dalam perkembangannya sulutan itu yang membuat memanas Papua saat ini. Sulutan itu menjadi perlawanan kolektif dan pada saat yang sama mudah ditunggangi oleh kelompok yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok bersenjata yang bersuara keras tentang referendum atau kemerdekaan Papua. Sehingga isunya mulai bergeser menjadi isu tuntutan referendum atau merdeka.

Kerusuhan di Papua semakin berkembang dengan adanya kasus seorang advokat Papua yaitu Veronica Koman. Pada tanggal 4 September 2019, Polda Jawa Timur menetapkan Vero sebagai tersangka karena diduga aktif menyebarkan provokasi

---

<sup>4</sup>Tito.id, “Kronologi Asal-Usul Kericuhan di Sorong, Manokwari, Fakfak, Papua”, <https://tirto.id/kronologi-asal-usul-kericuhan-di-sorong-manokwari-fakfak-papua-egHd> (Senin, 14 September 2020, 19.45)

<sup>5</sup>*Ibid.*

melalui akun Twitter @VeronicaKoman ihwal terkait masalah pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Tanggal 03 September 2019, Vero yang menyanggah status buron, membuka suara di media Australia dalam program *The World ABC TV*. Pada wawancara tersebut, Vero membantah bahwa dirinya adalah provokator dalam masalah yang ada di Papua. Vero juga mengatakan bahwa penetapan status tersangka kepada dirinya merupakan suatu upaya untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Vero juga mengatakan "Mereka tidak bisa membantah data serta rekaman video dan foto yang saya punya sehingga mereka hanya bisa menyerang kredibilitas saya". Vero berharap agar Pemerintah RI dapat membuka akses kembali untuk Komisi HAM PBB dan para jurnalis internasional ke Papua.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, menyebut masalah di Papua sudah kritis. Saat ini banyak media daring Australia yang memberitakan masalah di Papua dengan berbagai tema yang berbeda, salah satunya adalah media milik pemerintah Australia yaitu *Australian Broadcasting Corporation (ABC)*. Dalam acara *Six O'clock News* di ABC Australia selalu mengangkat tema tentang masalah Papua dengan isi pemberitaan yang terkesan sangat memprovokasi. Pemberitaan oleh *ABC News* terus menggalang opini bahwa pemerintahan Indonesia melakukan penyerangan di Papua. Hendro meminta pihak Australia tidak mencampuri urusan Papua. Hendro menilai bahwa pemberitaan tersebut nampak sekali penggiringan opini umum supaya masyarakat Australia menjadi pro kepada langkah-langkah yang nantinya diambil Papua. *ABC News*, juga melaporkan kerusuhan di Papua telah menyebabkan satu orang tentara dan dua warga sipil tewas, disebutkan juga ada banyak

tekanan pada pemerintah untuk merespons permintaan itu. *The Sydney Morning Herald*, media asal Australia mengatakan, berdasarkan video yang diperoleh dari *The Associated Press*, para demonstran di Abepura juga meneriakkan "Papua Merdeka" dan membentangkan poster "Kami bukan monyet".

Di antara kerumunan massa juga ada yang mengenakan ikat kepala Bintang Kejora dan memegang spanduk tuntutan referendum.<sup>6</sup>

Selain masalah kerusuhan yang ada di Papua, saat ini dunia sedang dilanda virus *Covid-19*. Namun, lagi-lagi pemberitaan yang tidak mengenakan datang dari media Australia *ABC News*. Pemberitaan dari media tersebut mengangkat tema tentang negara Papua dan Indonesia beresiko menjadi negara yang gagal karena potensi terjadinya kelalaian pada layanan kesehatan, kondisi ekonomi, penanganan kasus yang buruk. *ABC News* mengatakan bahwa Papua menanggung beban utang dan layanan kesehatan yang buruk. Kemungkinan virus sudah menyebar di beberapa wilayah tanpa deteksi dan tanpa pengobatan. *Covid-19* akan menjadi beban tambahan bagi negara yang sedang berjuang mengatasi berbagai penyakit lain seperti TBC dan malaria. Pemerintah Australia khawatir bahwa virus corona akan lepas kendali di kedua negara ini. Kondisi ini dipicu oleh keresahan politik karena frustrasi pada ketidakmampuan pemerintah dalam menangani wabah corona. Pemberitaan di media *ABC* ini terkesan ingin menjatuhkan Indonesia dan Papua dengan membuat asumsi bahwa Indonesia

---

<sup>6</sup>Beritasatu.com, "Hendropriyono Sebut TV Australia Provokasi Indonesia Soal Papua", <https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/592126/hendropriyono-sebut-tv-australia-provokasi-indonesia-soal-papua> (Rabu, 16 September 2020, 15.30)

gagal dalam mengatasi Covid-19, padahal sampai saat ini Virus Covid-19 masih menghantui seluruh negara termasuk Australia.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka judul penelitian yang ingin penulis angkat adalah **“PEMBERITAAN TENTANG MASALAH PAPUA OLEH MEDIA DARING AUSTRALIA PADA TAHUN 2019-2020”**.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana media daring Australia memberitakan masalah Papua pada tahun 2019-2020?
2. Tema apa saja yang mengemuka dalam pemberitaan media daring Australia tentang masalah Papua?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk dan jenis pemberitaan masalah Papua oleh media daring Australia.
2. Untuk mengetahui perhatian utama media daring Australia terhadap masalah Papua.

---

<sup>7</sup> Suara.com, “Media Australia Sebut Indonesia Negara Gagal dalam Tangani Corona”, <https://www.suara.com/news/2020/04/30/081347/media-australia-sebut-indonesia-negara-gagal-dalam-tangani-corona?page=all> (Rabu, 16 September 2020, 20.45)

### **1.3 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan praktis ditujukan kepada siapa saja yang membaca penelitian ini, yaitu agar para pembaca dapat memperoleh pandangan dan paradigma yang baru dalam melihat studi Hubungan Internasional, sehingga di masa depan para pembaca dapat memahami studi Hubungan Internasional dari sudut pandang lainnya yang cenderung jarang mendapat perhatian. Penulis juga ingin agar para pembaca dapat meningkatkan literasi dalam menerima informasi dan dapat melihat berita dari berbagai macam media agar terhindari dari *framing* satu media saja, khususnya mengenai bagaimana media daring Australia memberitakan masalah Papua.

Kegunaan teoritis lebih ditujukan kepada berbagai pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan informasi khususnya tentang pemberitaan media daring suatu negara terhadap suatu masalah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang tentang permasalahan yang ada di Papua Tahun 2019-2020 dan bagaimana media daring Australia memberitakan permasalahan tersebut. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan bagaimana rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.



## **BAB II : KERANGKA BERPIKIR**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti penulis. Tinjauan pustaka ini berupa penjelasan mengenai hubungan internasional, *problem sloving*, Berita, dan Media Daring.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan disebutkan dan dijelaskan tipe penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini.

## **BAB IV : ANALISIS**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian serta bagaimana analisis mengenai pemberitaan media daring Australia tentang masalah di Papua pada tahun 2019-2020.

## **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana kesimpulan yang didapat setelah melalui proses pembuatan latar belakang masalah sampai pada analisis data dan memberikan saran-saran yang membangun untuk pengelola media maupun untuk penelitian selanjutnya.